

PERAN PENDIDIKAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA

Oleh
Masharyono

Abstrak

Era globalisasi menuntut adanya sumber daya manusia (SDM) yang terampil, profesional dan mampu bersaing baik secara lokal, regional maupun internasional. Hal ini diiukti dengan adanya kemajuan yang sangat pesat di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap dunia kerja. Sasaran program peningkatan mutu SDM diantaranya pada berbagai jenis keahlian dan keterampilan agar dapat membentuk manusia Indonesia yang terampil dan siap bekerja sesuai dengan standar kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan.

Kata kunci: pendidikan, pemberdayaan, ekonomi, keluarga

Pendahuluan

Sumber daya manusia yang unggul itu akan dapat diperoleh melalui pendidikan. Mendapatkan pendidikan merupakan hak dari semua warga negara Indonesia sebagai mana tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 yang berbunyi :

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Sedangkan dalam UU No.20/2003 BAB IV tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5, dikemukakan bahwa :

“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

Bahkan Allah SWT menyerukan kepada kita semua untuk membaca (Iqra)

sebagaimana surat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang intinya supaya kita belajar. Dan Allah SWT akan menaikkan derajat orang-orang yang berilmu.

Apabila kita lihat kenyataannya jumlah pengangguran di Indonesia masih cukup banyak, dilihat dari tingkat pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia belum mampu mencetak sumber daya yang siap pakai dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengisi kebutuhan sektor-sektor dunia industri. Kesenjangan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha/ industri juga ditunjukkan dengan banyaknya kebutuhan tenaga kerja yang tidak terisi, sementara banyak lulusan pendidikan dan pelatihan yang sulit memperoleh pekerjaan, sehingga terpaksa menganggur untuk waktu yang relatif lama. Hal tersebut bisa kita lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. 1
Tingkat Pengangguran Berdasarkan Pendidikan (dalam ribuan)

Tingkat Pendidikan	2003	2004	2005	2006	2007	2008
≤ SD	3.344	3.280	3.554	3.525	3.420	2.745
SMP	2.345	2.691	2.681	2.860	2.643	2.167
SMA	3.397	3.696	3.912	4.047	3.745	3.370
Diploma	200	237	323	297	330	520
Sarjana	245	348	385	376	410	626
TOTAL	9.531	10.252	10.855	11.105	10.548	9.428

Sumber: Data dan Informasi Ketenagakerjaan 2009, <http://www.nakertrans.go.id>

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pengangguran tertinggi berada pada lulusan sekolah menengah atas (SMA). Hal jelas sebab lulusan SMA memang tidak mempunyai kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja dan industri. Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam era globalisasi dan industrialisasi adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian spesifik dan memiliki etos kerja. Untuk memperoleh tenaga-tenaga kerja tersebut memerlukan banyak upaya dari berbagai pihak, diantaranya lembaga pendidikan.

Salah satu dari lembaga pendidikan tersebut adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sekolah Menengah Kejuruan adalah jenjang pendidikan menengah formal yang kurikulumnya mengacu pada pendekatan akan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI). Pendidikan kejuruan dinilai sebagai solusi praktis mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu, pendidikan kejuruan juga dinilai strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Kartadinata dalam Toyib (2008:5) menegaskan bahwa pendidikan kejuruan yang baik sangat strategis dalam meningkatkan standar kualitas SDM, terutama ketika ingin menampilkan kemampuan SDM ke negara lain. Seian itu juga salah satu upaya bisa dilakukan untuk menekan angka pengangguran di Indonesia yaitu dengan memperdayaan perekonomian keluarga. Kita ketahui bahwa perekonomian di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh usaha-usaha kecil (UKM). Apabila

Pendidikan

Pendidikan merupakan ilmu terapan, yaitu terapan dari ilmu atau disiplin lain terutama filsafat, psikologi, sosiologi dan humanitas (Nana Syaodih S,1997:22). Sedangkan menurut Nana Sudjana (1988:1dan 2) pendidikan adalah uapaya manusia untuk “memanusiakan manusia”. Atau pendidikan proses sosialisasi untuk mencapai kompetensi pribadi, dan sosial sebagai dasar untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan kapasitas yang

dimilikinya. Pendidikan juga merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, melalui proses yang panjang dan berlangsung sepanjang hayat.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 (dalam Tim Redaksi Fokusmedia, 2003: 3) menyebutkan bahwa :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

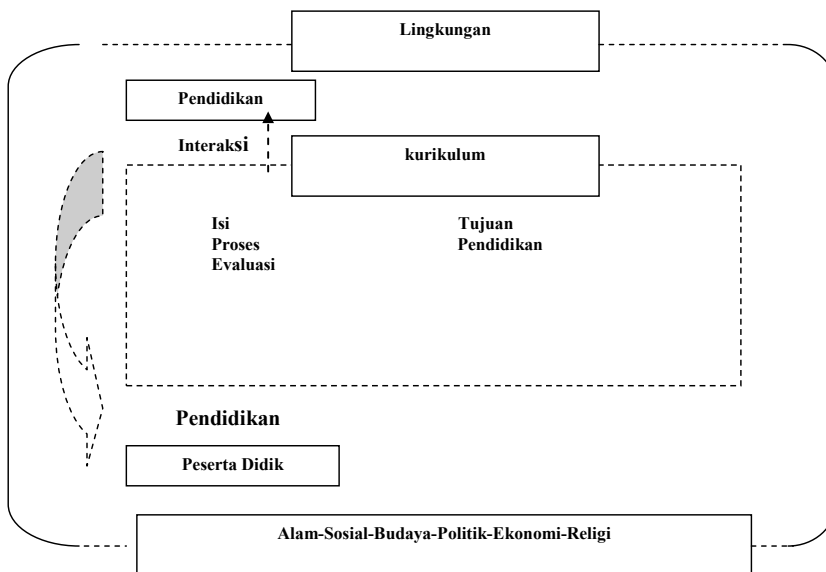
Pendidikan sebagai Investasi

Sebuah kajian tentang pendidikan sebagai investasi selalu dikaitkan dengan keuntungan yang diperoleh dari investasi itu. Secara pribadi dalam perspektif teori kapital manusia, faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan investasi dengan mengikuti pendidikan terkait dengan keuntungan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan (Kufman, 1994).

Investasi pada pendidikan merupakan keseluruhan biaya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk atau yang hilang karena orang yang bersangkutan mengikuti pendidikan. Biaya-biaya tersebut merupakan tambahan terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan sebelumnya. Secara teoritis menurut M. Ali (2009:189) setiap tambahan biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan akan menambah kemampuan yang dapat meningkatkan produktivitas. Dengan adanya peningkatan produktivitas akan berdampak terhadap penambahan pendapatan, apabila kemampuan yang diperoleh tersebut dapat dimanfaatkan.

Pendidikan memiliki hubungan yang signifikan dengan penghasilan. Secara sederhana hubungan antara pendidikan dan penghasilan dapat digambarkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan akan

Komponen-Komponen Utama Pendidikan



Gambar 1.1
Komponen Utama Pendidikan
(Sumber ; Nana Syaodih:1997:3)

menyebabkan semakin tinggi produktivitas. Dan dengan tingginya produktivitas akan mengakibatkan penambahan pendapatan. Hal tersebut sesuai dengan teori produktivitas marginal yang memandang bahwa upah ditentukan oleh kontribusi marginal seseorang tenaga kerja terhadap pendapatan perusahaan (M. Ali 2009:190). Jadi semakin produktif seseorang tenaga kerja semakin tinggi pula penghasilan yang akan diperoleh.

Keuntungan manfaat investasi pendidikan secara umum yaitu peningkatan kemampuan menyesuaikan diri dalam perubahan-perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, dalam kesempatan memperoleh pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik, dan dalam penyiapan tenaga kerja yang diminta untuk kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Jadi pendidikan merupakan aktivitas menyiapkan kehidupan, baik perseorangan maupun masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik lagi.

Sedangkan dalam konteks ekonomi, pendidikan memiliki manfaat dan keuntungan di masa yang akan datang baik bagi perseorangan, masyarakat ataupun negara. Karena investasi pendidikan akan memiliki kontribusi terhadap pendapatan atau revenue, sedangkan produktivitas dan pendapatan itu meningkatkan pendapatan publik seperti pajak dan lainnya, maka investasi pendidikan memberikan keuntungan publik.

Manusia sebagai Mahluk Ekonomi dan Sosial

Manusia melakukan berbagai kegiatan pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia berkaitan dengan situasi atau keadaan yang menuntut pemenuhan. Dalam situasi atau keadaan lapar kita membutuhkan makanan. Begitu juga dalam situasi atau keadaan haus kita membutuhkan minuman. Banyak lagi situasi atau keadaan yang menunjukkan adanya suatu kebutuhan.

Mengingat setiap kebutuhan menuntut pemenuhan maka kita berusaha memenuhinya atau memuaskannya. Kegiatan manusia dalam memenuhi atau memuaskan kebutuhannya itu menunjukkan kedudukan manusia sebagai makhluk ekonomi. Sebagai makhluk ekonomi, kita berusaha memilih dan menggunakan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan kita. Segala tindakan manusia, baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk ekonomi, menunjukkan perilaku dalam hubungan sesama manusia dan usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi perilaku manusia tersebut berkaitan dengan usaha memenuhi kebutuhan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada. Inti dari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya, yaitu tindakan memilih penggunaan atau pengalokasiannya. Dalam hal ini, sumber daya merupakan alat pemuas kebutuhan manusia. Biasanya berupa barang, jasa, dan lainnya.

Mengapa kita harus memilih dalam penggunaan atau pemanfaatan sumber daya yang tersedia itu! Hal ini dikarenakan jumlah sumber daya terbatas dibandingkan dengan jumlah kebutuhan yang harus dipenuhinya. Di samping itu, suatu sumber daya biasanya memiliki berbagai alternatif penggunaannya. Contoh: Ibu membelanjakan sejumlah uang di pasar untuk membeli sayuran, sabun mandi, sabun cuci, minyak goreng, dan lainnya. Minyak tanah yang tersedia di rumah digunakan untuk kompor dan lampu petromak. Bagi kalian yang di rumahnya telah teraliri listrik tentu menggunakan listrik yang ada untuk berbagai keperluan seperti lampu penerangan, kulkas, komputer, setrika, dan lainnya.

Pembedayaan Ekonomi Keluarga

Pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan suatu proses atau kegiatan agar keluarga mampu melakukan kegiatan ekonomi (bekerja atau berusaha) yang merupakan salah satu unsur kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan salah satu usaha yang dilakukan

oleh pemerintah bersama masyarakat untuk memantapkan keberhasilan Program Keluarga Berencana. Usaha pemberdayaan ini sejalan dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1992 Bab I yaitu tujuan akhir gerakan KB bukan hanya keluarga kecil, tetapi juga keluarga sejahtera, yang mencakup ekonomi keluarga. Makalah ini lebih memfokuskan bahasan pada program pemberdayaan ekonomi keluarga yang sedang dikembangkan oleh pemerintah saat ini, yaitu UPPKS (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera).

Salah satu gerakan pemberdayaan ekonomi keluarga yang cukup dikenal dan secara historis berkaitan dengan program keluarga berencana adalah UPPKS. Program UPPKS semula bernama UPPKA-KB yang dimulai sejak tahun 1976. Program ini awalnya diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga akseptor. Program ini kemudian berganti nama menjadi UPPKS dengan sasaran yang lebih luas yaitu keluarga akseptor dan bukan akseptor. Program UPPKS pada prinsipnya adalah suatu usaha untuk meningkatkan fungsi ekonomi keluarga untuk mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Secara khusus, program UPPKS ditujukan kepada pemberdayaan ibu rumah tangga. Melalui program ini, ibu melakukan kegiatan usaha produktif atau ekonomi dengan kemudahan akses pada modal (kredit Takesra/Kukesra) sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan keluarga. Cakupan usaha ini meliputi Pelaju Keluarga (Petik, olah, Jual dan Untung oleh Keluarga), Pemaju-Keluarga (Proses, Kemas, Jual, dan Untung oleh Keluarga), Penguja-Keluarga (Pengembangan Usaha Jana oleh Keluarga)

Sampai saat ini UPPKS difokuskan kepada para ibu dan wanita dengan pertimbangan bahwa kaum ibu adalah anggota keluarga yang memiliki peran besar dalam mengembangkan dan melaksanakan fungsi keluarga, dan potensinya dalam bidang ekonomi belum dimanfaatkan

secara optimal (Megawangi, R. dkk., 1997). Di dalam program UPPKS, seorang ibu menjadi anggota dari suatu kelompok yang menjalankan usaha produktif baik secara perorangan maupun kelompok.

Secara konseptual, program UPPKS mempunyai misi dan tujuan yang jelas dan mulia. Namun kenyataannya di lapangan ditemukan permasalahan dalam implementasinya. Beberapa kajian tentang UPPKS -menunjukkan bahwa salah satu faktor sentral yang mempengaruhi keberhasilan UPPKS adalah figur pengurus, modal, jenis usaha, pembinaan, pengalaman dan kemampuan dalam pengelolaan sumberdaya keluarga. (Megawangi, R. dkk., 1997 dan Sauqi, 1997). UPPKS yang berhasil memiliki pengurus dengan kemampuan manajemen, komunikasi yang baik dan jujur serta dihormati oleh masyarakat. Banyak UPPKS yang tidak berhasil karena lemahnya tokoh pengurus kelompok. Disamping itu mekanisme dan keterlibatan pihak lain dalam pemilihan pengurus kelompok juga turut menentukan keberhasilan usaha kelompok. PLKB/PPLKB umumnya melakukan pembinaan kelompok UPPKS sebelum pembentukan kelompok, yang hanya melibatkan pengurus saja. Secara umum bentuk materi yang diberikan oleh PLKB/PPLKB hanya menyangkut pelaporan, administrasi dan pembukuan saja. Pembinaan UPPKS ini banyak dilihat oleh petugas lapangan sebagai beban tambahan yang cukup memberatkan.

Kemudahan memperoleh pinjaman modal merupakan motivasi utama anggota dalam mengikuti kegiatan kelompok. Adanya UPPKS ini sangat membantu para anggota untuk mendapatkan kredit yang murah dan mudah. Hal ini karena ketersediaan kredit yang mudah dan murah merupakan masalah umum yang banyak dihadapi oleh keluarga kurang mampu. Rendahnya akses terhadap bank bagi keluarga pedesaan disebabkan karena adanya persyaratan yang rumit disamping banyak ditemukan masalah uang pelepas dengan harga yang sangat tinggi.

Kelompok UPPKS yang berhasil umumnya memiliki modal sendiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela yang dihimpun dari setiap anggota selain modal dari pihak luar. Adanya anggota yang menunggak kredit, juga erat kaitannya dengan pembinaan dan kemampuan anggota yang menjalankan usaha secara efisien dan efektif. Kredit macet ini menyebabkan kelancaran untuk memperoleh pinjaman dari kelompok menjadi terhambat, sehingga timbul rasa iri dikalangan anggota yang belum mendapatkan fasilitas kredit.

Secara makro tampak bahwa pernilan jenis usaha yang sesuai dengan potensi daerah merupakan faktor dalam mencapai keberhasilan UPPKS. Kelompok UPPKS ini memberi bantuan juga kepada jenis usaha baru yang berbeda dengan sebelumnya, seperti halnya di Kabupaten Bandung. Bantuan modal UPPKS ini telah memotivasi beberapa anggota untuk memanfaatkan peluang dalam memulai usaha produktif yang lebih menguntungkan. Misalnya hasil penelitian di Desa Bendosari, Kabupaten Blitar di mana anggota kelompok yang tadinya berdagang makanan kecil dengan modal yang relatif kecil telah mulai usaha baru dengan modal yang relatif besar seperti berternak ayam petelur.

Sebaliknya tak jarang pula ditemukan bahwa jenis usaha yang dikembangkan di suatu wilayah (desa, kecamatan) adalah usaha yang telah dilaksanakan oleh anggota atau salah seorang anggota dan kelompok lainnya meniru usaha yang sudah ada. Meskipun pelatihan yang berhubungan dengan kewirausahaan dan penentuan jenis usaha sudah diberikan dalam pelatihan tapi gagasan usaha kurang bernilai inovatif, bahkan pada umumnya adalah gagasan imitatif. Hal ini akan cepat menimbulkan kejenuhan usaha yang sejenis (persaingan semakin tinggi). Usaha-usaha ini biasanya dikelola oleh perorangan meskipun ada beberapa dikelola secara kolektif atau kelompok.

Membuka warung atau berdagang merupakan jenis usaha yang mempunyai

entry barrier seikit dan banyak digeluti oleh anggota UPPKS. Jenis usaha tersebut tidak memerlukan keterampilan khusus dan dapat dilakukan oleh siapa saja, asal anggota tersebut mempunyai modal yang cukup. Persaingan yang ketat telah diciptakan oleh orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha ini. Hasil evaltissi di 4 propinsi tahun 1997, ternyata masalah pemasaran dan persaingan merupakan faktor dominan yang menyebabkan banyak usaha-usaha yang bangkrut, sehingga banyak kelompok UPPKS yang gagal. Keterampilan berupa pelatihan dan pembinaan Bering diberikan kepada kelompok tetapi seringkali pelatihan dan pembinaan tersebut fclak sesuai dengan sasarannya.

Sebagai contoh, adanya pelatihan industri rumah tangga yang menghasilkan produk-produk yang sulit dipasarkan, padahal kelangsungan kegiatan ekonomi produktif UPPKS sangat ditentukan oleh keberhasilan dari segi pasar dan pemasaran produk. Misalnya, bagaimana supaya konsumen tertarik dengan melihat penampilan dan kemasan produk, bagaimana, promosi dan pemasaran yang aktif dapat dilakukan serta bagaimana mengetahui suatu produk yang diproduksi sesuai dengan jumlah dan kualitas yang, dibutuhkan konsumen.

Suatu penelitian mengenai kehidupan keluarga peserta dan bukan peserta Program UPPKS di dua kecamatan di Nusa Tenggara Barat mengungkap hal yang irons sekali, yaitu keluarga-keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I relatif belum dilibatkan dalam kegiatan UPPKS yang berhasil. Yang paling banyak terlibat dalam UPPKS adalah keluarga KS II, KS III dan bahkan KS III Plus yang cenderung mempunyai karakteristik sumberdaya keluarga yang, jauh lebih baik dari bukan peserta program UPPKS. Adanya perbedaan pendapatan keluarga peserta dan bukan peserta tidak semata-mata karena keikutsertaannya dalam. program UPPKS. Fasilitas perumahan yang lebih baik juga ditentukan oleh keberadaan perumahan yang relatif lebih baik sebelum mengikuti

program UPPKS.

Berdasarkan paparan di atas dipandang perlu untuk menyempurnakan implementasi program UPPKS. Pada hakekatnya UPPKS adalah program pemberdayaan ekonomi keluarga, terutama bagi dari keluarga berpendapatan rendah (Pra Sejahtera dan Sejahtera I) bukan kesejahteraan ibu, meskipun ibu juga figur dalam ekonomi keluarga. Di masa datang sebaiknya sasaran program UPPKS memperkenankan keterlibatan bapak atau memberikan kesempatan bagi bapak untuk menjadi anggota kelompok. Keterlibatan bapak dalam anggota kelompok akan lebih memberi nuansa inovasi dalam pemilihan jenis usaha, penggunaan/pengembangan teknologi dan pengelolaan usaha. Di samping itu pemisahan pemisahan ibu dan bapak dalam hal ini kurang sesuai dengan nilai keluarga dalam budaya timur.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa keluarga bukan peserta UPPKS adalah keluarga-keluarga yang berdasarkan karakteristik sumberdaya keluarga, manajemen keluarga dan pola pengasuhan, dan kesejahteraan keluarga adalah keluarga Prasejahtera dan KS I yang relatif tertinggal. Sehubungan dengan hal ini keanggotaan UPPKS perlu pula diperlims dengan anggota keluarga yang sudah berpengalaman clan sukses berwirausaha.

Kegiatan usaha UPPKS adalah di sektor informal. Usaha ini memiliki ciri yang menonjol yang juga menjadi kelemahannya, yaitu : 1) Usaha tidak terorganisasikan dengan baik, 2) Usaha pada umumnya tidak memiliki aspek legal, 3) produksi tidak teratur, 4) Menggunakan tenaga keda keluarga yang pada umumnya kurang memiliki keterampilan maupun pendidikan formal yang tinggi. Oleh karena meningkatkan produktivitas keluarga bukan hanya sekedar masaiah peningkatan pengetahuan dan keterampilan melainkan juga adanya pemecahan secara menyeluruh dan terpadu bersama instansi terkait yaitu mulai d-gri pemenuhan saran usaha, permodalan, bahan baku, hasil produksi, dan

pemasaran. Menjadikan satu usaha dengan usaha lainnya sebagai suatu usaha yang saling dukung dan terkait.

Beberapa pola pembinaan keterkaitan usaha yang digunakan oleh BUMN dan BUMS dengan pengusaha kecil, seperti keterkaitan langsung, dengan pola PIR, pola dagang, pola penaja dan pola kontraktor, perlu dikembangkan dalam UPPKS. Pembinaan haruslah terintegrasi mulai aspek produksi sampai aspek pasar dan pemasaran dan dilakukan terus menerus. Untuk itu UPPKS haruslah mendapat pembinaan yang lebih intensif dan bermutu (bila perlu disubsidi) dan fasilitas yang lebih baik. Pembinaan tersebut mencakup (a) pembinaan sasaran yang meliputi subyek yang dibina (pengurus, anggota, dan tingkungan kelompok UPPKS), aspek pembinaan (mencakup keterampilan, kualitas produk kemasan, pemasaran, manajemen); (b) cara pembinaan dilakukan dengan beberapa cara seperti pertemuan, bimbingan teknis, lomba, pameran, studi banding; (c) keterlibatan beberapa pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kelompok. Sedangkan peran Berta dari pihak swasta dapat dilakukan melalui penerapan sistem pola bapak angkat. Dukungan perusahaan bapak angkat ini bisa berupa dukungan manajemen, bimbingan teknis, bantuan modal, keda, teknologi dan sebagainya.

Sehubungan dengan peningkatan mutu dan perluasan UPPKS di masa datang, kemitraan dengan perguruan tinggi dapat pula dilakukan terutama dalam hal pengembangan modal dan metode pelatihan, peningkatan mutu petugas lapangan (PLKB/PPLKB) tentang kewiraswastaan, pengembangan metode pembinaan, pengembangan produk dan teknologi yang inovatif, pendampingan kegiatan UPPKS dalam suatu kawasan baik oleh mahasiswa senior yang KKN maupun oleh staf pengajar.

Referensi

- Adioetomo, SM., Asmanedi, Hendratno, Fitriati, L., Eggleston, E., Hardee K., Hull TH, 1997. *Helping Husband Maintaning Harmony: The Relationship between Family Planning, Women's Work and Household Autonomy*. The Women's Studies project/Family Health International.
- Hardinsyah dan Ujang Sumarwan, 2011. *Pemberdayaan Ekonomi Keluarga*. [Http://www.nakertrans.go.id](http://www.nakertrans.go.id)
- Megawangi, R. Israwati, Purwanto, Sumarwan, U., Sriudyani IA., Wahyuni, D. Dan Meyer. DR., Garfinkel, L, Bartfeld, J. and Brown P. 1994. *An Evolving Child.Support System*. Focus number 1, Vol 16. University of Wisconsin – Madison.
- Nana Syaodih Sukmadinata, 1997, *Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktek*, PT. Ramaja Rosda Karya : Bandung.
- Nana Sudjana. 1989. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Sinar Baru : Bandung.
- Pangemanan, S. 1997. *Faktor-faktor yang memipengaruhi Keberhasilan UPPKS. Kerjasama Ikatan Sosiologi Indonesia dengan Kantor Menteri negara Kependudukan/BKKBN*. Jakarta.
- Rahmat Indra, 2009. *Pengaruh Efektivitas Pembelajaran Program Produktif Administrasi Perkantoran Terhadap Kesiapan Kerja Siswa di Bidang Kesekretarisan Di Smk Negeri 3 Bandung*.
- Sauqi, A. 1997. *Analisis kehidupan keluarga peserta dan bukan peserta pangan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) di dua kecamatan nusa tenggara barat*. Tesis Magister. Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sihombing, J.N. 1994. *Upaya Peningkatan Produktivitas Keluarga melalui Bentukbentuk usaha ekonomi keluarga*. Makalah Seminar

- Pembangunan Keluarga Sejahtera. Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN. Juli 1994, Jakarta.
- S. Nasution, MA. 1982. Asas-Asas Kurikulum. Jemmars Bandung.
- Syamsul Hadi Senen dan Masharyono. 2008. Pendidikan Bisnis, Bandung:
- Teknik Pemasaran Hasil-Hasil Industri. Proyek Bimbingan Dan Pengembangan Industri Kecil Khusus Golongan Ekonomi Lemah Departement Perindustrian 1977. Jakarta.
- The United Nations Development Programme 1996. Human Development Report. New York.
- UUD 1945
- UU No 2/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional